

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu tanpa diskriminasi. Dengan demikian, sektor pendidikan memegang peran penting dalam mewujudkan nilai-nilai nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. (halik 2025) Tujuannya adalah untuk membentuk individu yang memiliki kekuatan spiritual, kemampuan mengendalikan diri, akhlak yang baik, kecerdasan, serta keterampilan yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam era globalisasi dan modernitas yang semakin pesat, pendidikan menjadi aspek krusial dalam kehidupan. Banyak orang rela berjuang demi meraih tingkat pendidikan tertinggi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pendidikan sering dihubungkan dengan status sosial seseorang, sebab mereka memiliki Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya mendapatkan penghargaan yang lebih besar serta peluang menempati posisi yang lebih diutamakan. dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pendidikan juga berperan penting dalam memperluas wawasan serta menyajikan berbagai informasi tentang fenomena-fenomena baru yang mungkin jarang ditemui atau dibicarakan di lingkungan sekitar. (Sanjaya, 2018)

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan beragam langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penerapan sejumlah kebijakan strategis. Salah satunya adalah pelaksanaan program wajib belajar yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar sembilan tahun, sebagai wujud penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, pada tahun 2013, pemerintah kemudian memperluas cakupan program tersebut dengan menetapkan program wajib belajar dua belas tahun., yang dikenal dengan sebutan Pendidikan Menengah Universal. Program ini bertujuan untuk mempertahankan keberhasilan kebijakan sebelumnya sekaligus mempersiapkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi, dan sesuai prinsip keadilan sosial. Namun, meskipun program wajib belajar telah diterapkan, kenyataannya masih banyak anak yang tidak sekolah, menunjukkan bahwa akses pendidikan di Indonesia belum merata dan kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih menyeluruh dan terpadu. agar layanan pendidikan dapat lebih mudah diakses serta memastikan bahwa wajib belajar 12 tahun benar-benar berjalan dengan optimal bagi seluruh masyarakat. ( Maulia et al., 2023)

Meskipun beragam langkah telah ditempuh untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. masih banyak permasalahan yang harus dihadapi, seperti pergaulan bebas, kenakalan remaja, serta tingginya angka putus sekolah yang terus menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak semata bergantung pada aspek akademik, tetapi

juga pada penguatan pembinaan karakter, lingkungan sosial yang sehat, serta dukungan keluarga dan masyarakat dalam membimbing perkembangan peserta didik. (Jannah, 2025)

salah satu masalah yang memprihatinkan salah satu indikator yang tampak adalah jumlah anak yang mengalami putus sekolah yang masih tergolong tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan anak putus sekolah adalah atau motivasi untuk bersekolah, yang sering kali disebabkan oleh rasa malas. Faktor ini berasal dari berasal dari diri siswa itu sendiri (faktor internal), misalnya rendahnya motivasi untuk belajar. ketidakpercayaan diri, atau merasa tidak mampu mengikuti pelajaran, ditambah dengan kondisi keluarga yang mengalami ketidakharmonisan atau perpecahan (broken home). Di samping itu, keterbatasan ekonomi juga kerap menjadi penyebab utama munculnya tindakan eksploitasi terhadap anak. (Putri, 2018) Selain faktor internal, penyebab anak putus sekolah juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti adanya sosial budaya yang mempengaruhi anak putus sekolah, faktor internal yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa hingga akhirnya memicu putus sekolah meliputi aspek intelegensi, motivasi, tingkat kesadaran, dan ketidaksukaan terhadap sekolah. Sementara itu, Sementara dari sisi eksternal, faktor ekonomi, kondisi keluarga, norma sosial budaya, serta keterbatasan akses informasi turut memperparah situasi. Dalam beberapa kasus, anak juga terjebak dalam aktivitas ekonomi keluarga dan kurang mendapat perhatian yang memadai dari lingkungan sekitar. Senada dengan itu, Sugianto (dalam Yorizal, 2017) menyebutkan bahwa secara umum terdapat tiga faktor utama penyebab anak putus sekolah: pertama, kondisi anak itu sendiri yang lebih menyukai bekerja dibandingkan belajar. Hal ini ditegaskan pula oleh Lim (2008)

yang menyatakan bahwa terdapat kebijakan sekolah tertentu yang secara tidak langsung mendorong siswa untuk keluar dari sekolah.. (Gulo et al., 2021).

Menurut laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka putus sekolah menunjukkan pola yang tidak stabil atau mengalami naik-turun di berbagai jenjang pendidikan pada tahun ajaran 2023/2024. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), angka putus sekolah meningkat dari 0,17% pada tahun ajaran 2022/2023 menjadi 0,19%. Kenaikan juga terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dari 0,14% menjadi 0,18%. Sebaliknya, penurunan tercatat pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dari 0,20% menjadi 0,19%. Namun, di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), angka putus sekolah kembali meningkat dari 0,23% menjadi 0,28%. BPS juga melaporkan data mengenai siswa yang mengalami tinggal kelas, dan menunjukkan bahwa jumlah tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan tertentu.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan di beberapa sektor, tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan masih perlu menjadi perhatian serius. Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) mencatat bahwa pada tahun 2021, jumlah anak yang tidak melanjutkan sekolah di tingkat SD mencapai 38.116 siswa, SMP sebanyak 15.042 siswa, dan SMA/SMK hanya 22.085 siswa. Jika dibandingkan dengan data tahun 2023, angka putus sekolah di jenjang SMP dan SMA/SMK justru mengalami lonjakan. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan anak yang berhenti sekolah masih menjadi hambatan utama dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pemerintah, bersama dengan masyarakat dan pihak terkait, perlu mengambil

langkah lebih konkret untuk mengatasi masalah ini agar cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dapat benar-benar terwujud.

**Gambar 1. 1 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2024**

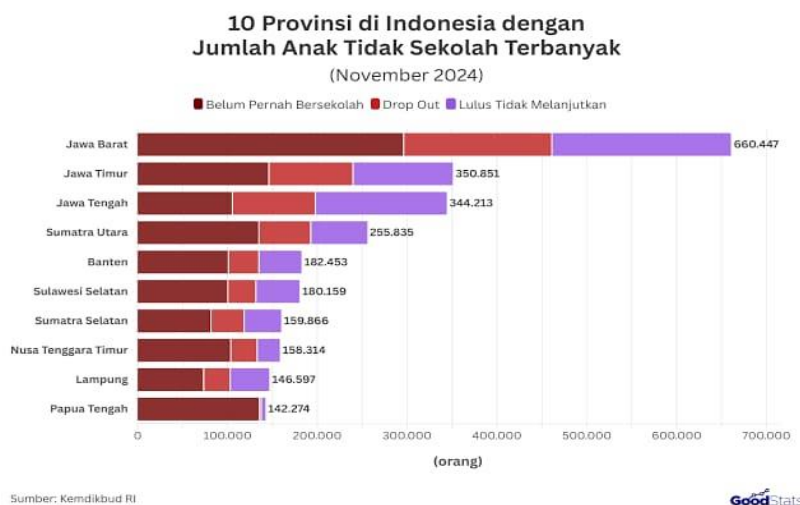


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Data mengenai angka putus sekolah di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat anak tidak sekolah masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah. Berdasarkan urutan provinsi, Jawa Timur menempati posisi kedua sebagai wilayah dengan angka anak tidak sekolah tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan di Jawa Timur masih membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam upaya menekan angka anak tidak sekolah dan memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan pendidikan yang layak. Situasi tersebut juga menegaskan pentingnya

penguatan program pendidikan yang terarah dan berkelanjutan agar target peningkatan partisipasi sekolah dapat tercapai secara optimal (Alifa, 2023)

**Gambar 1. 2 10 Provinsi Di Indonesia dengan jumlah anak tidak sekolah terbanyak**



Sumber : Data *Live* Kemendikbud Yang Diakses pada 5 November 2024,

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud RI) per November 2024 Provinsi Jawa Timur berada di posisi kedua dengan jumlah anak tidak bersekolah terbanyak di Indonesia, yaitu mencapai 350.851 orang. Jumlah ini mencakup anak-anak yang sama sekali belum mengenyam pendidikan, yang putus sekolah di tengah jalan, serta mereka yang telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tingginya angka tersebut menunjukkan adanya tantangan serius terkait aksesibilitas dan kesinambungan pendidikan di wilayah Jawa Timur. Kondisi ini menjadi sorotan penting mengingat Jawa Timur termasuk provinsi dengan jumlah penduduk yang besar dan titingkat pembangunan yang relatif lebih cepat dibandingkan

dengan daerah lain. Namun, tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah justru mencerminkan adanya ketimpangan dalam aspek sosial dan ekonomi, serta kemungkinan kurangnya dukungan atau intervensi sosial yang optimal dalam menjamin keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak. (GoodStats, 2025)

**Tabel 1. 1 Anak Tidak Sekolah se Jawa Timur Tahun 2022-2024**

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah ATS
1	Kab. Jember	35.688
2	Kab. Sampang	27.760
3	Kab. Malang	27.062
4	Kab. Bangkalan	26.989
5	Kota. Surabaya	20.555
6	Kab. Pasuruan	17.199
7	Kab. Sumenep	13.336
8	Kab. Probolinggo	12.542
9	Kab. Kediri	10.566
10	Kab. Lumajang	10.545

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2025

(Andriani, 2021) Menurut data dari badan Pendidikan statistika Pada tahun 2025, jumlah kasus anak putus sekolah di Indonesia bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar pula risiko terjadinya putus sekolah pada anak. dengan data terjadi pada jenjang SMA/SMK sederajat dengan presentase (1,02%) sedangkan yang terkecil SD sederajat dengan presentas (0,11%) data tersebut bisa dikatakan bahwasannya kasus anak putus sekolah yang terjadi di Indonesia membutuhkan dukungan khusus dari dinas Pendidikan kota Surabaya yakni yang berperan penting dalam mengatasi permasalahan ini melalui berbagai program dan intervensi untuk mendukung anak dan keluarganya. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa Dengan meningkatnya jenjang pendidikan, peluang seorang siswa mengalami putus sekolah juga bertambah.

Selain itu, laki-laki lebih rentan mengalami putus sekolah dibanding perempuan, dan anak-anak di daerah perdesaan lebih berisiko putus sekolah dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan. Permasalahan anak tidak bersekolah tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga menjadi tantangan serius di berbagai wilayah di Indonesia, dengan fokus khusus pada Jawa Timur. Yang menempati urutan kedua secara nasional. Berikut tabel yang menunjukkan data anak tidak bersekolah di Indonesia berdasarkan tingkat provinsi.(Nyoman, 2020)

Surabaya mengalami perkembangan pesat di berbagai sektor dari tahun ke tahun. Sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta dan juga sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Surabaya menduduki peringkat kedua sebagai kota tersibuk di Indonesia. Tak heran jika Pemerintah Kota terus melakukan berbagai pembenahan dan pembangunan untuk mendukung kemajuan kota. Namun, di tengah gemerlapnya pembangunan tersebut, masih terdapat masyarakat yang berada dalam kondisi kurang menguntungkan. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah masih banyaknya anak yang tidak bersekolah atau berisiko putus sekolah akibat kondisi ekonomi keluarga yang rendah, sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Akibatnya, hak anak atas pendidikan dalam program wajib belajar 12 tahun menjadi kurang terpenuhi.(Puspaningtyas, 2020)

Meskipun Kota Surabaya bukan wilayah dengan angka putus sekolah tertinggi di Jawa Timur (peringkat ke-5), urgensi penanganannya justru tinggi. Surabaya merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk terbesar di provinsi ini, sehingga jumlah ATS yang masih mencapai 20.555 jiwa memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang lebih luas dibandingkan daerah lain yang lebih kecil. Kota Surabaya



memiliki posisi memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang Pendidikan. Pemerintah kota secara konsisten menjalankan berbagai program inovatif guna meningkatkan mutu pendidikan, antara lain dengan memperkuat sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, serta memberikan dukungan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program andalan seperti Beasiswa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Sekolah Gratis diinisiasi untuk menurunkan angka anak putus sekolah dan mewujudkan pemerataan akses Pendidikan. yang bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah sekaligus mendorong kesetaraan akses pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Surabaya dari 2023 hingga Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya terus melaksanakan berbagai inovasi dan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik melalui pemberian beasiswa maupun bantuan pendukung lainnya. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemkot Surabaya telah menyalurkan beasiswa kepada 9.064 siswa SD, 9.319 siswa SMP, 20.356 siswa SMA, serta 3.196 mahasiswa. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah di berbagai jenjang. (Yassin et al., 2025)

Selain itu, Surabaya telah mengimplementasikan program outreach sejak 2018 dan memperbaruinya pada 2024 menjadi Program KRISNA, namun pelaksanaannya masih belum mencapai hasil yang sepenuhnya optimal. Program KRISNA sendiri merupakan upaya kesetaraan pendidikan bagi warga Surabaya, namun kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realisasinya. Sebagai kota yang menjadi rujukan pembangunan daerah di Jawa Timur,

evaluasi terhadap efektivitas program ini penting dilakukan, baik untuk perbaikan kebijakan lokal maupun sebagai model bagi wilayah urban lainnya. Berkaitan dengan upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan sebelumnya telah menjalankan program intervensi berupa Bina Warga Belajar (outreach) (Iswahyudi, 2020), yang berlandaskan pada Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi warga belajar di PKBM (Sakti, 2025)

**Tabel 1. 2 Anak Tidak Sekolah per Kecamatan Kota Surabaya**

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah ATS
1	Kec. Semampir	2.858
2	Kec. Kenjeran	2.111
3	Kec. Tambaksari	1.349
4	Kec. Sawahan	1.278
5	Kec. Krembangan	979
6	Kec. Simokerto	934
7	Kec. Wonokromo	821
8	Kec. Tegalsari	819
9	Kec. Bubutan	750
10	Kec. Gubeng	622
Total		12.521

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2025

Sebagai respons terhadap kondisi pendidikan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan melaksanakan program intervensi (outreach) yang berlandaskan pada Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan yang memadai bagi peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Tetapi realitanya di beberapa kota besar termasuk kota Surabaya masih ditemukan anak yang tidak sekolah sebanyak 20.555 anak. Kebijakan ini kemudian diperbarui pada tahun 2024 dengan program Kesetaraan Hadir untuk Warga Surabaya (KRISNA). Kebijakan ini sejalan dengan pelaksanaan program wajib belajar

12 tahun sesuai ketentuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022–2024, yang menekankan pada pemberian layanan pendidikan, perluasan akses, serta upaya memastikan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas hingga usia 21 tahun.

Dalam pelaksanaannya, Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mendapat intervensi melalui program *Kesetaraan Hadir untuk Warga Surabaya* (KRISNA) diarahkan untuk mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan kesetaraan atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang menyelenggarakan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Seluruh kegiatan pembelajaran bagi peserta didik KRISNA didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya. Selama implementasi program *KRISNA* pada tahun 2024 hingga 2025, terdapat 2.908 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Surabaya yang berhasil diintervensi dan kembali bersekolah melalui PKBM. Kecamatan Semampir menjadi wilayah dengan jumlah ATS tertinggi, yakni sebanyak 2.858 orang. Rincian jumlah ATS di setiap kecamatan Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut. (Sakti, 2025)

Keberhasilan Dinas Pendidikan dalam upaya menangani anak putus sekolah dapat diamati melalui tingkat efektivitas program yang dijalankan. Efektivitas sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal. Program Dinas Pendidikan dinilai efektif jika tindakan atau upaya yang dilakukan mampu menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut P. Siagian (2016), efektivitas program dapat diukur melalui empat indikator utama. Pertama, ketersediaan sumber daya, dana, sarana, dan prasarana harus

ditetapkan serta dibatasi agar penggunaannya sesuai dengan kebutuhan program dan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kedua, target terkait jumlah maupun kualitas hasil atau layanan perlu dirumuskan secara jelas sehingga tingkat keberhasilan program dapat dinilai. Ketiga, adanya ketentuan mengenai batas waktu dalam pencapaian hasil atau pelayanan menjadi penting agar pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Keempat, prosedur atau tata cara pelaksanaan yang telah disusun berfungsi sebagai acuan kerja sehingga jalannya program berlangsung lebih terarah dan sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu program tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, ketepatan waktu, serta penerapan prosedur kerja yang sistematis sehingga program dapat memperoleh hasil secara maksimal. Oleh karena itu efektivitas menjadi tolok ukur penting untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai oleh dinas pendidikan melalui menangani kasus anak putus sekolah (Muliani,2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas DISPENDIK kota surabaya dalam menangani kasus anak tidak sekolah di Kota Surabaya, salah satunya melalui implementasi program Kesetaraan Hadir Untuk Warga Surabaya (Krisna) melalui dinas Pendidikan kota Surabaya untuk menangani anak tidak sekolah. Program ini berperan strategis dalam membantu orang tua menghadapi berbagai permasalahan anak, termasuk risiko putus sekolah, dengan menyediakan layanan konseling, pendampingan, serta edukasi mengenai pentingnya pendidikan. Upaya tersebut diperkuat melalui pembentukan forum koordinasi antara, Dinas Pendidikan kota Surabaya, DP3AKKB, Dinas Sosial, dan instansi terkait yang berfungsi sebagai wadah

untuk membahas permasalahan anak putus sekolah sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan. Forum ini menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan efektivitas program h melalui dinas Pendidikan kota surabaya agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran, baik melalui penguatan kesadaran keluarga maupun dukungan reintegrasi pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“EFEKTIFITAS PROGRAM KESETARAAN HADIR UNTUK WARGA SURABAYA KRISNA DALAM MENANGANIKASUS ANAK TIDAK SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana efektivitas program Kesetaraan Hadir Untuk Warga (Krisna) dalam menangani anak tidak sekolah pada Dinas Pendidikan kota surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memahami, menilai, dan menganalisis efektivitas program Kesetaraan Hadir Untuk Warga (Krisna) dalam menangani anak tidak sekolah pada Dinas Pendidikan kota surabaya?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, termasuk pihak penyusun maupun pihak terkait lainnya. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan akademik mengenai efektifita program krisna pada dinas Pendidikan kota surabaya dalam mengatasi masalah sosial, terutama anak putus sekolah.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

##### **1. Bagi Pemerintah Kota Surabaya**

Penelitian ini berfungsi untuk menjadi evaluasi dan saran bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan program Krisna, terutama dalam menangani anak tidak sekolah dan memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

##### **2. Bagi Peneliti**

Penelitian ini berfungsi untuk menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam memahami langsung efektivitas program krisna pada dinas Pendidikan kota surabaya Selain itu, penelitian ini dapat melatih keterampilan analisis, penelitian lapangan, serta memberikan wawasan lebih luas terkait permasalahan sosial dan pendidikan di masyarakat.

##### **3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan sumber referensi yang bermanfaat untuk studi atau penelitian selanjutnya.